

Perancangan Peningkatan Tata Kelola TI Kliping Digital di Instansi Pemerintahan Menggunakan Pendekatan Manajemen Informasi

Andyah Putera Utama Siahaan¹, Efriansyah Putra Bahari Barus², Muhammad Hasanuddin^{3,*}, Zulfan⁴, Fakhri Rizaldi⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
Email: ¹andiesiahaan@gmail.com, ²efriansyahbarus@gmail.com, ^{3,*}muhammadhasan20feb@gmail.com, ⁴mrzulfan64@gmail.com, ⁵fakhririzaldi06@gmail.com

(* Email Corresponding Author: muhammadhasan20feb@gmail.com)

Received: 4 Januari 2026 | Revision: 8 Januari 2026 | Accepted: 8 Januari 2026

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menuntut tersedianya tata kelola teknologi informasi (TI) yang efektif untuk mendukung strategi pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu layanan informasi yang memiliki peran penting adalah sistem kliping digital, yang berfungsi sebagai sarana pemantauan pemberitaan media dan opini publik. Namun pemanfaatan sistem kliping digital di instansi pemerintah sering kali belum didukung oleh tata kelola TI yang matang dan terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem kliping digital di lingkungan instansi pemerintah menggunakan kerangka COBIT 2019, dengan fokus pada domain APO01 (Manage the IT Management Framework), APO11 (Manage Quality), dan APO14 (Manage Data). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Data primer dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner Skala Likert yang disusun berdasarkan praktik-praktik COBIT 2019 dan disebarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan kliping digital. Analisis data dilakukan melalui pengukuran tingkat kemampuan dan analisis gap antara tingkat kapabilitas aktual dan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa domain ketiga COBIT 2019 berada pada tingkat kapabilitas Level 2 (Managed), dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar APO01 = 2,54, APO11 = 2,47, dan APO14 = 2,51, sementara tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah Level 3 (Established). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan tata kelola TI yang perlu ditangani, terutama pada aspek kerangka tata kelola, manajemen kualitas layanan, dan pengelolaan data kliping digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian tata kelola TI berbasis COBIT 2019 serta kontribusi praktis bagi instansi pemerintah dalam merancang strategi peningkatan tata kelola TI guna mendukung efektivitas dan kelangkaan layanan kliping digital.

Kata Kunci: Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 2019, Kliping Digital, Capability Level, Sektor Publik

Abstract

Digital transformation in the public sector requires effective information technology (IT) governance to support strategic information management and data-driven decision-making. One of the information services that plays a critical role is the digital clipping system, which functions as a tool for monitoring media coverage and public opinion. However, the implementation of digital clipping systems in government institutions is often not supported by mature and standardized IT governance practices. This study aims to evaluate the capability level of IT governance in a digital clipping system within a government institution using the COBIT 2019 framework, focusing on the APO01 (Manage the IT Management Framework), APO11 (Manage Quality), and APO14 (Manage Data) domains. This research employs a quantitative approach with a descriptive-correlational design. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire developed based on COBIT 2019 practices and distributed to personnel directly involved in digital clipping management. Data analysis was conducted through capability level measurement and gap analysis between the current and expected capability levels. The results indicate that all three COBIT 2019 domains are at Capability Level 2 (Managed), with mean scores of APO01 = 2.54, APO11 = 2.47, and APO14 = 2.51, while the expected capability level is Level 3 (Established). These findings reveal the existence of IT governance gaps, particularly in the areas of governance framework formalization, service quality management, and digital data governance. This study contributes theoretically to the literature on COBIT 2019-based IT governance and provides practical insights for government institutions in developing strategies to enhance IT governance in order to improve the effectiveness and sustainability of digital clipping services.

Keywords: Information Technology Governance, COBIT 2019, Digital Clippings, Capability Level, Public Sector

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis utama dalam reformasi sektor publik di berbagai negara, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data[1], [2]. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai pengelola informasi strategis yang harus mampu merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi secara cepat dan akurat[3]. Dalam konteks ini, teknologi informasi (TI) memegang peranan sentral sebagai enabler utama bagi terciptanya pemerintahan digital yang adaptif dan data driven[4]. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola TI, bukan semata oleh ketersediaan teknologi atau aplikasi digital yang digunakan[5].

Di Indonesia, percepatan transformasi digital pemerintahan secara formal diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan integrasi proses bisnis, pemanfaatan data, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi[6]. Namun, implementasi SPBE di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kesenjangan tata kelola TI, rendahnya standarisasi proses, serta lemahnya manajemen data dan kualitas layanan informasi. Sejumlah penelitian terkini mengindikasikan bahwa banyak organisasi publik telah mengadopsi sistem digital, tetapi belum diikuti oleh kerangka tata kelola TI yang matang dan terukur, sehingga manfaat strategis dari digitalisasi belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu bentuk layanan informasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pimpinan instansi pemerintah adalah kliping digital[7]. Kliping digital berfungsi sebagai mekanisme sistematis untuk menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi media massa yang relevan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari kliping digital sering kali menjadi dasar analisis opini publik, pemantauan isu strategis, serta bahan pertimbangan dalam perumusan respons kebijakan. Oleh karena itu, efektivitas sistem kliping digital sangat bergantung pada kecepatan penyajian informasi, konsistensi kualitas konten, serta keandalan data yang dikelola. Tanpa dukungan tata kelola TI yang baik, sistem kliping digital berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat, tidak konsisten, atau terlambat, sehingga mengurangi nilai strategisnya bagi pimpinan organisasi[8].

Permasalahan utama yang banyak dijumpai dalam pengelolaan kliping digital di instansi pemerintah adalah belum optimalnya tata kelola TI yang menopang proses tersebut[9]. Praktik operasional sering kali masih bergantung pada prosedur informal, dokumentasi yang terbatas, serta ketergantungan pada individu tertentu[10]. Selain itu, aspek manajemen kualitas dan tata kelola data kerap belum diatur secara sistematis, sehingga kualitas informasi kliping sulit dijaga secara konsisten. Kondisi ini diperparah oleh minimnya mekanisme evaluasi kapabilitas tata kelola TI yang objektif dan terstandar. Akibatnya, instansi pemerintah kesulitan mengidentifikasi posisi kematangan tata kelola TI mereka saat ini serta menentukan langkah perbaikan yang tepat dan berbasis bukti[11].

Secara konseptual, berbagai kerangka kerja tata kelola TI telah dikembangkan untuk membantu organisasi memastikan bahwa pemanfaatan TI selaras dengan tujuan strategis dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Dalam literatur ilmiah, kerangka COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) diakui sebagai salah satu framework yang paling komprehensif dan banyak digunakan secara internasional untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola serta manajemen TI[12], [13]. Versi terbaru, COBIT 2019, menawarkan pendekatan berbasis tujuan (governance and management objectives) serta pengukuran tingkat kapabilitas proses yang memungkinkan organisasi menilai kondisi aktual, menentukan target yang diharapkan, dan mengidentifikasi kesenjangan tata kelola secara sistematis[14], [15].

Sejumlah penelitian terdahulu telah memanfaatkan COBIT 2019 untuk menilai tata kelola TI di berbagai konteks organisasi, termasuk sektor pendidikan, layanan administrasi publik, dan pengelolaan data organisasi. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak organisasi berada pada tingkat kapabilitas menengah (Level 2–Managed), yang menandakan bahwa proses telah berjalan dan dipantau, tetapi belum sepenuhnya distandardisasi dan dikendalikan secara konsisten. Domain Align, Plan, and Organize (APO) dalam COBIT 2019, khususnya APO01 (Manage the IT Management Framework), APO11 (Manage Quality), dan APO14 (Manage Data), sering diidentifikasi sebagai area kritis yang menentukan keberhasilan tata kelola TI[12]. APO01 berperan sebagai fondasi kerangka tata kelola, APO11 menjamin kualitas layanan dan informasi, sementara APO14 mengatur pengelolaan data sebagai aset strategis organisasi[15].

Meskipun demikian, tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian yang secara spesifik mengkaji tata kelola TI pada sistem kliping digital di lingkungan instansi pemerintah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada sistem informasi akademik, layanan kepegawaian, atau pengelolaan data internal organisasi, tanpa mempertimbangkan karakteristik unik kliping digital yang bersifat rutin, berbasis waktu nyata, dan sangat sensitif terhadap kualitas serta integritas data. Selain itu, penelitian terdahulu jarang menggabungkan analisis simultan atas domain APO01, APO11, dan APO14 untuk mengevaluasi efektivitas manajemen informasi media. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan terkait bagaimana tata kelola TI memengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kliping digital sebagai sumber informasi strategis bagi pimpinan pemerintahan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem kliping digital di instansi pemerintah dengan menggunakan kerangka COBIT 2019, dengan fokus pada domain APO01, APO11, dan APO14. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI aktual pada masing-masing domain, (2) membandingkan tingkat kapabilitas aktual dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh organisasi, serta (3) mengidentifikasi kesenjangan tata kelola yang memerlukan prioritas perbaikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan terintegrasi COBIT 2019 untuk mengevaluasi tata kelola TI pada konteks kliping digital pemerintahan, yang selama ini masih jarang dikaji. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengukuran kapabilitas proses dan analisis gap tata kelola TI, tanpa mengevaluasi aspek teknis perangkat lunak secara mendalam, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang relevan bagi pengembangan tata kelola TI di sektor publik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi secara objektif dan terstandar berdasarkan kerangka COBIT 2019. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual tata kelola TI pada sistem kliping digital di instansi pemerintah, sedangkan pendekatan korelasional bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara domain tata kelola TI yang diteliti dengan efektivitas pengelolaan kliping digital sebagai layanan informasi strategis bagi pimpinan organisasi.

Kerangka COBIT 2019 digunakan sebagai landasan metodologis karena menyediakan struktur tata kelola dan manajemen TI yang komprehensif, serta dilengkapi dengan mekanisme pengukuran capability level yang dapat digunakan untuk menilai kematangan proses secara sistematis dan terukur.

2.2. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem kliping digital yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam mengelola informasi media sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan pimpinan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada evaluasi tata kelola teknologi informasi yang mendukung sistem kliping digital, dengan fokus pada tiga domain COBIT 2019 dalam area Align, Plan, and Organize (APO), yaitu APO01 (Manage the IT Management Framework), APO11 (Manage Quality), dan APO14 (Manage Data).

Pembatasan ruang lingkup pada ketiga domain tersebut didasarkan pada relevansinya dengan karakteristik kliping digital yang menuntut kejelasan kerangka tata kelola, konsistensi kualitas informasi, serta pengelolaan data yang terstruktur, aman, dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi teknis perangkat lunak atau infrastruktur secara mendalam, melainkan berfokus pada aspek tata kelola dan manajemen proses.

2.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian meliputi pegawai dan personel instansi pemerintah yang terlibat secara langsung dalam proses kliping digital dan pengelolaan teknologi informasi pendukungnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa tidak seluruh pegawai memiliki keterlibatan atau pemahaman yang memadai terkait tata kelola TI dan operasional kliping digital. Kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

- pegawai yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, atau distribusi kliping digital.
- pegawai yang memiliki peran dalam pengelolaan sistem informasi atau data; serta
- pegawai yang memahami prosedur kerja dan kebijakan terkait pemanfaatan TI.

Dengan kriteria tersebut, data yang diperoleh diharapkan mencerminkan kondisi tata kelola TI secara akurat.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan praktik-praktik dan aktivitas proses pada domain APO01, APO11, dan APO14 COBIT 2019. Setiap butir pertanyaan dirancang untuk merepresentasikan tingkat penerapan tata kelola TI dalam konteks sistem kliping digital.

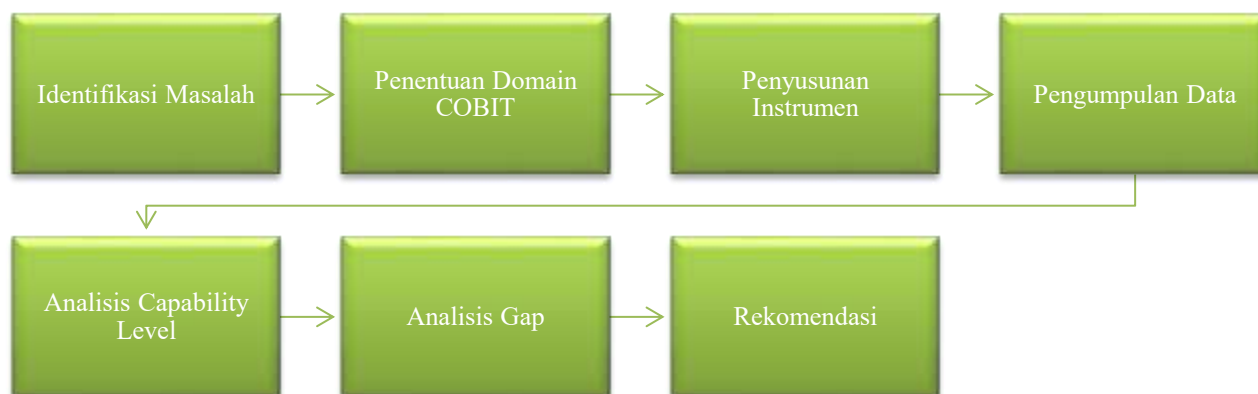
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima tingkat, dengan rentang nilai 1 (sangat tidak diterapkan) hingga 5 (diterapkan secara optimal). Penggunaan skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi dan praktik tata kelola TI secara kuantitatif serta memudahkan proses pengolahan dan analisis data.

2.5. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi masalah hingga analisis hasil penelitian. Tahapan penelitian mencakup:

identifikasi permasalahan tata kelola TI pada sistem kliping digital;

- penentuan domain COBIT 2019 yang relevan.
- penyusunan instrumen penelitian.
- pengumpulan data melalui survei.
- pengolahan dan analisis data; serta
- penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola TI.



Gambar 1. Alur Penelitian Evaluasi Tata Kelola TI pada Sistem Kliping Digital Menggunakan COBIT 2019

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada metode pengukuran capability level COBIT 2019. Data hasil kuesioner diolah untuk memperoleh nilai rata-rata (mean) pada setiap domain yang diteliti. Nilai rata-rata tersebut kemudian dipetakan ke dalam tingkat kapabilitas COBIT 2019, mulai dari Level 0 (Incomplete) hingga Level 5 (Optimizing).

Selanjutnya, dilakukan analisis gap dengan membandingkan tingkat kapabilitas aktual (current capability level) dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan (expected capability level) oleh organisasi. Analisis gap ini bertujuan untuk mengidentifikasi selisih kapabilitas serta menentukan domain dan aktivitas proses yang memerlukan prioritas peningkatan.

2.7. Pemetaan Domain COBIT 2019

Untuk memperjelas keterkaitan antara domain COBIT 2019 dan kebutuhan sistem kliping digital, dilakukan pemetaan konseptual terhadap ketiga domain yang diteliti. Domain APO01 diposisikan sebagai fondasi kerangka tata kelola TI, APO11 sebagai penjamin kualitas layanan dan informasi kliping, serta APO14 sebagai pengelola data kliping digital sepanjang siklus hidupnya. Pemetaan ini menjadi dasar dalam interpretasi hasil penelitian dan perumusan rekomendasi perbaikan tata kelola TI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola informasi teknologi pada sistem kliping digital serta pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian berdasarkan kerangka COBIT 2019. Fokus analisis diarahkan pada tiga domain dalam area Align, Plan, and Organize (APO), yaitu APO01 (Manage the IT Management Framework), APO11 (Manage Quality), dan APO14 (Manage Data). Analisis dilakukan melalui pengukuran tingkat kemampuan, analisis gap antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta interpretasi bukti bukti terhadap efektivitas sistem kliping digital di instansi pemerri

3.1. Hasil Pengukuran Tingkat Ka

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diperoleh dari responden, nilai rata-rata (mean) tingkat kapabilitas aktual untuk masing-masing domain COBIT 2019 menunjukkan pola yang relatif seragam. Domain APO01 memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,54, domain APO11 sebesar 2,47, dan domain APO14 sebesar 2,51. Nilai ketiga tersebut berada pada jarak Lev.

Tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh organisasi pada domain ketiga tersebut ditetapkan pada Level 3 (Established), yang mencerminkan kondisi di mana proses telah didefinisikan secara formal, distandardisasi, dan diterapkan secara konsisten. Perbandingan antara tingkat kapabilitas aktual dan tingkat kapabilitas yang diharapkan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi prioritas perbaikan area lebih lanjut.

Tabel 1. Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain COBIT 2019

Domain COBIT 2019	Tingkat Arus Rata-Rata	Tingkat yang Diharapkan	Celah	Tingkat
APO01 – Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI	2,54	3	0,46	Level 2 (Terkelola)
APO11 – Mengelola Kualitas	2,47	3	0,53	Level 2 (Terkelola)

APO14 – Kelola Data	2,51	3	0,49	Level 2 (Terkelola)
Rata-rata	2,51	3	0,49	Level 2 (Terkelola)

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola TI pada sistem kliping digital berada pada fase transisi menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi. Proses-proses utama telah dijalankan dan diverifikasi, namun belum sepenuhnya terdokumentasi dan distandardisasi sesuai karakteristik Level 3 COBIT 2019.

3.2. Analisis Gap Domain APO01 (Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI)

Domain APO01 fokus pada pembentukan dan pengelolaan kerangka tata kelola TI yang terstruktur, termasuk penetapan kebijakan, peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengendalian. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa domain ini memiliki nilai rata-rata kapabilitas aktual sebesar 2,54 dengan gap sebesar 0,46 terhadap tingkat kapabilitas yang diharapkan.

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Domain APO01 (Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI)

TIDAK	Aktivitas Proses	Tingkat Saat Ini	Tingkat yang Diharapkan	Celah
1	Standar kualitas kliping digital	2,4	3	0,6
2	Proses verifikasi dan validasi konten	2,5	3	0,5
3	Pengendalian kualitas layanan	2,4	3	0,6
4	Konsistensi format penyajian berita	2,5	3	0,5
5	Ketepatan waktu produksi kliping	2,6	3	0,4
6	Mekanisme umpan balik pengguna	2,4	3	0,6
Rata-rata		2,47	3	0,53

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka tata kelola TI telah ada dan diterapkan, tingkat formalitasnya masih terbatas. Beberapa aktivitas penting seperti dokumentasi standar kualitas, mekanisme pengendalian, dan umpan balik pengguna belum sepenuhnya dilembagakan dalam bentuk prosedur formal. Kondisi ini menyebabkan proses implementasi sangat bergantung pada praktik individu, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pengelolaan kliping digital.

Dalam perspektif COBIT 2019, Level 2 (Dikelola) menandakan bahwa proses telah direncanakan dan dipantau, tetapi belum memiliki standar organisasi yang baku. Untuk mencapai Level 3 (Didirikan), organisasi perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas tata kelola TI terdokumentasi secara formal, disosialisasikan, dan diterapkan secara konsisten lintas unit kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kelemahan utama tata kelola TI di sektor publik terletak pada aspek standarisasi dan formalitas proses, bukan pada ketiadaan aktivitas operasional.

3.3. Analisis Gap Domain APO11 (Manajemen Kualitas)

Domain APO11 berkaitan dengan penjaminan kualitas layanan dan informasi TI, termasuk kualitas konten kliping digital yang dihasilkan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa domain ini memiliki nilai rata-rata kapabilitas aktual terendah dibandingkan domain lain, yaitu sebesar 2,47, dengan gap terbesar sebesar 0,53.

Tabel 3. Analisis Kesenjangan Domain APO11 (Manajemen Kualitas)

TIDAK	Aktivitas Proses	Tingkat Saat Ini	Tingkat yang Diharapkan	Celah
1	Proses pengumpulan data kliping	2,6	3	0,4
2	Klasifikasi dan metadata konten	2,4	3	0,6
3	Mekanisme penyimpanan data digital	2,5	3	0,5
4	Aksesibilitas dan pencarian data	2,6	3	0,4
5	Keamanan dan perlindungan data	2,4	3	0,6
6	Pencadangan dan pemulihan data	2,5	3	0,5
Rata-rata		2,51	3	0,49

Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek manajemen kualitas merupakan area yang paling membutuhkan perhatian. Proses penjaminan kualitas konten kliping, seperti validasi, konsistensi format, dan evaluasi kualitas layanan, belum distandardisasi secara menyeluruh. Akibatnya, kualitas keluaran kliping digital cenderung bervariasi dan sangat bergantung pada kompetensi masing-masing operator.

Dalam konteks layanan informasi strategis, kelemahan pada domain APO11 memiliki efektivitas yang serius, karena kliping informasi digunakan langsung oleh pimpinan untuk menyatukan opini publik dan menetapkan kebijakan respons.

Tanpa sistem jaminan kualitas yang kuat, risiko penyajian informasi yang tidak akurat atau tidak relevan menjadi semakin tinggi. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa manajemen kualitas merupakan tantangan utama dalam implementasi tata kelola TI di sektor publik, terutama pada layanan yang berbasis data dan informasi.

3.4. Analisis Gap Domain APO14 (Kelola Data)

Domain APO14 fokus pada tata kelola data sebagai aset strategi organisasi, mencakup pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, keamanan, dan pemeliharaan data sepanjang siklus hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa domain ini memiliki nilai rata-rata kapabilitas aktual sebesar 2,51 dengan gap sebesar 0,49.

Tabel 4. Analisis Kesenjangan Domain APO14 (Manajemen Data)

TIDAK	Aktivitas Proses	Tingkat Saat Ini	Tingkat yang Diharapkan	Celah
1	Proses pengumpulan data kliping	2,6	3	0,4
2	Klasifikasi dan metadata konten	2,4	3	0,6
3	Mekanisme penyimpanan data digital	2,5	3	0,5
4	Aksesibilitas dan pencarian data	2,6	3	0,4
5	Keamanan dan perlindungan data	2,4	3	0,6
6	Pencadangan dan pemulihan data	2,5	3	0,5
Rata-rata		2,51	3	0,49

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan data kliping digital telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan terstandarisasi. Kelemahan utama terletak pada aspek metadata, keamanan data, dan prosedur backup yang belum diformalkan. Dalam konteks pemerintahan digital, kelemahan tata kelola data berpotensi menimbulkan risiko kehilangan data, pelanggaran keamanan, serta rendahnya kebocoran informasi.

Dari perspektif COBIT 2019, peningkatan dari Level 2 ke Level 3 pada domain APO14 menuntut adanya kebijakan data yang jelas, standar metadata yang konsisten, serta mekanisme pengamanan dan pemulihan data yang terdokumentasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tata kelola data merupakan fondasi utama bagi keberhasilan layanan digital berbasis informasi.

3.5. Pembahasan Integratif dan Implikasi Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa tata kelola TI pada sistem kliping digital berada pada tingkat kapabilitas Level 2 (Dikelola) dan belum mencapai Level 3 (Established) yang ditargetkan organisasi. Meskipun celah yang ditemukan relatif kecil, keberadaannya menunjukkan bahwa tata kelola TI belum sepenuhnya matang dan masih memerlukan perbaikan struktural.

Hasil ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kapabilitas aktual dan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa organisasi sektor publik pada umumnya berada pada fase transisi dalam implementasi tata kelola TI berbasis COBIT 2019.

Dari perspektif praktis, domain APO11 dan APO14 muncul sebagai area prioritas perbaikan, mengingat peran sentral kualitas informasi dan tata kelola data dalam sistem kliping digital. Sementara itu, domain APO01 perlu diperkuat sebagai fondasi tata kelola untuk menjamin konsistensi implementasi di seluruh unit organisasi. Dengan memperkuat domain ketiga tersebut secara terintegrasi, instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas sistem kliping digital sebagai sumber informasi strategi yang Andal dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kapabilitas tata kelola informasi teknologi pada sistem kliping digital di instansi pemerintah, berdasarkan kerangka COBIT 2019 pada domain APO01, APO11, dan APO14, berada pada Level 2 (Managed), yang menunjukkan bahwa proses tata kelola telah berjalan dan diawasi, namun belum sepenuhnya distandardisasi dan dikendalikan secara konsisten di seluruh organisasi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai kapabilitas aktual masing-masing domain masih berada di bawah tingkat kapabilitas yang diharapkan, yaitu Level 3 (Established), dengan selisih selisih yang mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek formalitas proses, dokumentasi, dan pengendalian tata kelola TI. Domain APO11 dan APO14 muncul sebagai area yang paling memerlukan perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas informasi dan pengelolaan data kliping digital yang menjadi sumber strategi bagi pimpinan organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem kliping digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kematangan tata kelola TI yang menopangnya. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tata kelola TI berbasis COBIT 2019 dalam konteks layanan informasi pemerintahan yang spesifik, yaitu kliping digital, yang selama ini masih jarang diteliti. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan

dasar yang tujuan bagi instansi pemerintah untuk merancang strategi peningkatan tata kelola TI melalui penyusunan prosedur operasional standar yang terintegrasi, penguatan layanan kualitas manajemen, serta penerapan tata kelola data yang lebih sistematis dan berkelanjutan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, tepat waktu, dan berbasis informasi yang andal.

REFERENCES

- [1] R. A. Habibani and A. Frinaldi, "Inovasi Budaya Organisasi Publik Dalam Era Digital: Peluang Dan Strategi Implementasi," *Soc. J. Inov. Pendidik. IPS*, vol. 5, no. 2, pp. 407–421, 2025, doi: 10.51878/social.v5i2.5365.
- [2] A. Yasa, S. Suswanta, M. Rafi, F. Rahmanto, D. Setiawan, and M. Iqbal Fadhlorrohan, "Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia," *Nakhoda J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 20, no. 1, pp. 27–42, 2021, doi: 10.35967/njip.v20i1.139.
- [3] R. Hatala and N. Latuconsina, "Transformasi Digital di Pedesaan: Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat," *Popul. J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 18, no. 1, pp. 104–125, 2023, doi: 10.30598/populis.18.1.104-125.
- [4] R. Anugrah, D. Nugroho, and A. Nuche, "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dalam Pembentukan Kinerja Organisasi Bisnis di Indonesia," *J. MENTARI Manajemen, Pendidik. dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 134–141, 2024, doi: 10.33050/mentari.v2i2.480.
- [5] L. Q. M. Rumakat, "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Administrasi Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 4282–4289, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.1193.
- [6] M. S. J. Sangaji and J. Irianto, "Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital," *Jejaring Adm. Publik*, vol. 17, no. 1, pp. 54–70, 2025, doi: 10.20473/jap.v17i1.72708.
- [7] A. R. Nugraha, D. F. Sjoraida, and E. Novianti, "Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik," *PROfesi Humas J. Ilm. Ilmu Hub. Masy.*, vol. 6, no. 2, p. 286, 2022, doi: 10.24198/prh.v6i2.37095.
- [8] D. Lase, Y. Absah, P. Lumbanraja, Y. Giawa, and Y. Gulo, "Teori Budaya Organisasi: Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi," *Tuhenori J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 21–45, 2025, doi: 10.62138/tuhenori.v3i1.128.
- [9] I. K. A. Teken and A. Romarina, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar," *J. Terap. Pemerintah. Minangkabau*, vol. 4, no. 2, pp. 111–123, 2024, doi: 10.33701/jtprm.v4i2.4419.
- [10] J. A. M. Putra, D. Permata, A. I. P. Djani, D. L. Sabetu, Y. N. Finit, and F. Mas'ud, "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan," *JIMU J. Ilm. Multidisipliner*, vol. 3, no. 02, pp. 1239–1251, 2025, [Online]. Available: <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/754>
- [11] I. Ikbal, "Tata Kelola Teknologi Informasi Di Universitas Pqr Berbasis Framework Cobit 4.1," *J. Teknol. dan Inf.*, vol. 7, no. 2, 2018, doi: 10.34010/jati.v7i2.495.
- [12] Anadya Tafdhilla, J. Hasna Iftinan, Azzahra Rahmadani, and Anita Wulansari, "Penilaian Penggunaan Framework COBIT 2019 dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Pada Institusi Perguruan Tinggi," *Bull. Comput. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 91–100, 2023, doi: 10.47065/bulletincsr.v4i1.314.
- [13] A. Hestingtyas, Alva Hendi Muhammad, and Asro Nasiri, "Framework Cobit Pada Domain Apo02 Dalam Tata Kelola Teknologi Informasi Manage Strategy," *J. Inform. Teknol. dan Sains*, vol. 5, no. 3, pp. 316–321, 2023, doi: 10.51401/jinteks.v5i3.2787.
- [14] W. Dari and H. Bastian, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Kejaksaan Negeri Sanggau Menggunakan Framework Cobit 2019," *IJIS - Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 10, no. 1, p. 48, 2025, doi: 10.36549/ijis.v10i1.358.
- [15] B. A. Exacta, Suprpto, and A. Rachmadi, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 pada Proses EDM04, APO07, dan DSS01 (Studi Kasus: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 6, pp. 1–13, 2025.